

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945. Setiap orang dengan berbagai kondisi sudah semestinya memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Umumnya pendidikan diperoleh melalui sekolah formal, namun ada beberapa kondisi dimana seseorang tidak bisa mengikuti pendidikan formal. Kelompok ini yang kemudian harus dijamin mendapat pendidikan dengan kualitas yang sama meski melalui jalur yang berbeda, baik itu pendidikan nonformal maupun pendidikan informal.

Salah satu pendidikan nonformal yang ada di Indonesia saat ini adalah pendidikan kesetaraan yaitu program pendidikan umum setara SD/MI atau Paket A, setara SMP/MTs atau Paket B, dan setara SMA/MA atau Paket C, ataupun kecakapan hidup untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Pendidikan kesetaraan bukan hanya diperuntukkan bagi orang dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mendapat ijazah setara SD/SMP/SMA, tetapi juga diperuntukkan bagi anak usia sekolah yang kesulitan belajar di pendidikan formal. Hadirnya pendidikan kesetaraan pada awalnya ditujukan untuk memberikan layanan pendidikan bagi mereka yang terpaksa putus sekolah. Fenomena putus sekolah ini umumnya terjadi di desa atau daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan. Hakim (2020) dalam penelitiannya di Provinsi Aceh dengan metode analisis regresi logistik, menemukan bahwa hal-hal yang dapat menyebabkan anak putus sekolah diantaranya adalah sebagai berikut: tingkat pendidikan orangtua yang rendah, tidak memiliki KIP/tidak mendapatkan bantuan pemerintah untuk bersekolah, anak ikut bekerja mencari nafkah, kemiskinan, dan tinggal di desa.

Namun saat ini, fenomena putus sekolah juga banyak terjadi di kota besar. Saat ini banyak anak usia sekolah di kota besar yang pada akhirnya memilih untuk berhenti dari sekolah formal, dan memilih alternatif pendidikan

lainnya, seperti *homeschooling*. Kendala yang dihadapi misalnya: anak yang memiliki kesibukan lain di luar sekolah karena mengembangkan minat dan bakatnya di bidang selain akademis (contohnya mengikuti program untuk menjadi atlet atau berprofesi di bidang *entertainment*); anak yang memiliki kondisi khusus seperti *slow learner*, *fast learner* atau memiliki gangguan perkembangan tertentu sehingga sulit mengikuti pembelajaran biasa sebagaimana anak lainnya; atau anak yang memiliki masalah psikologis, baik itu karena mengalami perundungan di sekolah, konflik dengan keluarga maupun sebab lainnya, sehingga mengganggu performa belajarnya di sekolah formal. Ariefianto (2017) menyebutkan bahwa beberapa siswa memilih *homeschooling* karena merasa kecewa dengan sikap guru atau adanya teman yang melakukan perundungan. Senada dengan Purnamasari dkk (2017) yang mengungkap adanya kasus perundungan di sekolah formal yang menyebabkan siswa mengalami trauma mendalam sehingga memutuskan untuk pindah ke *homeschooling*.

Umumnya mereka yang berhenti dari sekolah formal lalu mencari alternatif pendidikan di jalur nonformal ini tidak memiliki masalah keterbatasan ekonomi sebagaimana yang terjadi di daerah 3T, justru sebaliknya, sebagian besar berasal dari kelompok ekonomi menengah keatas. Selain itu, orangtua yang memilih jalur nonformal untuk pendidikan anaknya di kota besar, cenderung memiliki kesadaran pendidikan yang lebih tinggi sehingga memilih alternatif pendidikan yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak. Hal ini sejalan dengan Ningsih (2019) yang mengemukakan orangtua di kota besar cenderung memilih jalur pendidikan yang dipandang lebih tepat bagi kebutuhan dan kondisi anak.

Homeschooling dapat diartikan sebagai model pendidikan dimana orangtua memilih untuk mendidik anak mereka sendiri dibandingkan dengan mengirim mereka untuk belajar di sekolah formal (Ahi & Sengil-Akar, 2020). Faizul, Dina, & Julhadi (2022) menjelaskan terdapat tiga bentuk *homeschooling* yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yaitu: *homeschooling* tunggal, *homeschooling* majemuk, dan *homeschooling* komunitas. Berbeda

dengan jenis *homeschooling* lainnya, pelaksanaan *homeschooling* komunitas hampir sama seperti sekolah formal pada umumnya namun lebih terbatas.

Adanya *homeschooling* komunitas membuat praktik *homeschooling* di Indonesia berbeda dengan konsep *homeschooling* dimana siswa belajar di lingkungan keluarga dengan orangtua sebagai guru. Dalam *homeschooling* komunitas yang ada di Indonesia, kegiatan pembelajaran dilakukan sebagaimana di sekolah formal namun dengan waktu yang lebih terbatas. Munculnya *homeschooling* komunitas di Indonesia dapat dikatakan sebagai upaya untuk menjawab kritik atas konsep *homeschooling* itu sendiri. Romanowski (2001) menjelaskan beberapa keterbatasan model *homeschooling* yang menjadi kritik utama dari model tersebut. Pertama, keterbatasan model *homeschooling* berkaitan dengan kurangnya sosialisasi para *homeschoolers* karena lingkungan belajar yang terbatas pada lingkungan keluarga. Disisi lain, siswa *homeschoolers* disebutkan kurang bisa melihat keragaman yang ada di masyarakat karena lingkungan belajar mereka cenderung memiliki satu nilai yang sama. Kedua, keterbatasan model *homeschooling* berkaitan dengan kemampuan orangtua sebagai guru. Banyak pihak yang berpendapat bahwa tidak semua orangtua memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memberikan pembelajaran yang baik bagi anaknya. Ketiga, keterbatasan *homeschooling* lainnya yaitu mengenai kurangnya sumber daya belajar yang dimiliki orangtua untuk memfasilitasi pembelajaran anak.

Kritik tersebut menjadi dasar munculnya *homeschooling* komunitas di Indonesia. *Homeschooling* komunitas yang berwujud pendidikan nonformal ini menjawab persoalan sosialisasi *homeschoolers* yang terbatas dengan adanya interaksi siswa dalam *homeschooling* komunitas tersebut. *Homeschooling* komunitas juga memberikan pembelajaran yang terstruktur dengan tutor yang kompeten dan berpengalaman serta menyediakan fasilitas pembelajaran yang lebih mumpuni dibandingkan *homeschooling* tunggal atau majemuk (Faizul, Dina, & Julhadi, 2022).

Semakin banyaknya lembaga *homeschooling* komunitas yang muncul juga didukung dengan berdirinya Asosiasi *Homeschooling* dan Pendidikan Alternatif (Asah Pena) pada tahun 2006 di Jakarta (Burhani, 2006). Pendiri

Asah Pena sendiri merupakan tokoh-tokoh yang dikenal baik di Indonesia seperti Seto Mulyadi, Neno Warisman, Dewi Hughes dll. Hal tersebut juga menyumbang respon positif masyarakat terhadap konsep *homeschooling* komunitas yang ditawarkan (Nasution & Choli, 2022). Seto Mulyadi sebagai pendiri Asah Pena tersebut juga memberikan *statement* bahwa *homeschooling* tidak terbatas belajar di rumah atau lingkungan keluarga, tetapi poin utama dari *homeschooling* adalah siswa bisa belajar di mana saja dan kapan saja dengan situasi yang nyaman dan menyenangkan selayaknya di rumah (Annisa dkk, 2023). *Statement* tersebut secara tidak langsung menguatkan konsep *homeschooling* komunitas yang serupa dengan sekolah formal.

Hingga saat ini, minat masyarakat terhadap *homeschooling* semakin tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh *National Home Education Research Institute* menemukan bahwa pada tahun 2020 terdapat 3,7 juta siswa *homeschoolers* atau 6-7% dari anak usia sekolah, dengan pertumbuhan 2% sampai 8% tiap tahunnya (Laraspati, 2022). Minat yang tinggi terhadap *homeschooling* ini juga dapat dilihat sebagai sebuah peluang bisnis yang besar, sehingga semakin banyak lembaga *homeschooling* komunitas yang bermunculan di berbagai kota di Indonesia (Asri, 2016).

Tingginya minat masyarakat terhadap *homeschooling* dapat disebabkan oleh beberapa hal. **Pertama**, *homeschooling* telah menjadi pendidikan alternatif yang keberadaannya diakui oleh pemerintah sebagaimana tertulis dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian, dasar hukum dan legalitas *homeschooling* semakin dipertegas dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah. Adanya dasar hukum tersebut, maka orangtua tidak lagi ragu dalam memutuskan jalur *homeschooling* untuk pendidikan anaknya.

Kedua, *homeschooling* komunitas umumnya menawarkan pembelajaran fleksibel yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Fleksibilitas ini dapat dilihat dari jadwal pembelajaran yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara orangtua, murid, dan tutor maupun metode pembelajaran atau interaksi tutor-murid yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi

peserta didik. Melalui pembelajaran yang fleksibel, siswa yang sulit mengikuti ritme belajar di sekolah formal dapat mengikuti pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Meski memiliki keunggulan tersebut, pengembangan dan implementasi kurikulum pendidikan kesetaraan di lapangan masih menemukan banyak persoalan.

Sutjipto (2016) menyoroti proses dan dinamika pengembangan kurikulum pendidikan kesetaraan di Indonesia yang cenderung lebih lambat dibandingkan pengembangan kurikulum pendidikan formal. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pengembangan kurikulum 2013 yang dimulai sejak 2010 lalu selesai pada tahun 2015, sementara dokumen kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan baru dirilis oleh Kemendikbud pada November 2017. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa pengembangan kurikulum pendidikan kesetaraan cenderung dilakukan setelah kurikulum pendidikan formal selesai (Sutjipto, 2016). *Gap year* perumusan kurikulum pendidikan formal dengan kurikulum pendidikan kesetaraan ini menunjukkan pemerintah belum memberikan perhatian yang cukup pada pendidikan kesetaraan. Sosialisasi kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan pun belum dilakukan secara merata hingga beberapa tahun setelahnya, menyebabkan banyak satuan pendidikan nonformal yang kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan (Pranyono dan Haryanto, 2020).

Salah satu lembaga pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan adalah *Homeschooling* Putra Gama (HSPG), yang berlokasi di Jalan Kencana Raya, BSD, kota Tangerang Selatan. Lembaga *homeschooling* ini berpusat di kota Yogyakarta namun saat ini telah memiliki cabang di beberapa kota, salah satunya di kota Tangerang Selatan. Di HSPG BSD, program pendidikan yang disediakan yaitu pendidikan setara SD (Paket A), pendidikan setara SMP (Paket B), pendidikan setara SMA (Paket C), dan bimbingan belajar privat. Sementara itu, kelas yang ditawarkan yaitu: kelas individu, kelas komunitas, kelas jarak jauh/*distance learning class*, dan kelas mandiri atau non-pondampingan, yang mana orangtua dan peserta didik dapat memilih kelas yang ditawarkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Pembelajaran yang dilakukan masih mengacu pada kurikulum

nasional sebagaimana sekolah formal, tetapi yang dimodifikasi dengan memperhatikan pengembangan minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik. Kemudian, HSPG BSD menggunakan dua pendekatan dalam melaksanakan pembelajarannya, yaitu pendekatan psikologis dan pendekatan akademik. Pendekatan psikologis dilakukan dengan melakukan serangkaian tes kepada peserta didik untuk mengetahui latar belakang peserta didik, minat, bakat dan kemampuannya. Hasil tes ini akan menjadi pendasaran dalam menentukan metode pembelajaran dan pemberdayaan yang tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik siswa. Pengembangan minat dan bakat yang terdeteksi melalui tes ini pun akan dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Sementara yang dimaksud dengan pendekatan akademik yaitu memberikan sistem pembelajaran yang menyesuaikan dengan tingkat kemampuan, gaya belajar serta karakter komunikasi peserta didik.

Meski begitu, pada tahun-tahun sebelumnya, HSPG BSD belum memiliki dokumen kurikulum sendiri sehingga masih menggunakan Kurikulum Operasional Sekolah yang dikeluarkan oleh HSPG Pusat Yogyakarta. Hal tersebut menjadi masalah karena kondisi HSPG Pusat dengan kondisi HSPG BSD berbeda dilihat dari aspek kondisi siswa, kondisi tutor, kondisi manajemen ataupun kondisi sarana dan prasarana yang tersedia. Akan tetapi, pada April 2023, HSPG BSD telah menyelesaikan dokumen kurikulum berupa Kurikulum Operasional Sekolah (KOS) dimana dalam dokumen tersebut terdapat analisis karakteristik satuan pendidikan yang menjadi dasar penyusunan kurikulum.

Pada saat ini, HSPG BSD masih menggunakan kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran. Sebagaimana dikatakan oleh Pranyono dan Haryanto (2020), implementasi kurikulum di satuan pendidikan nonformal masih ditemukan berbagai masalah. Hal ini juga terjadi di HSPG BSD. Implementasi kurikulum adalah suatu penerapan konsep, gagasan, ide, program atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran yang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas guru, sarana dan prasarana yang memadai, serta manajemen sekolah yang baik (Hamalik, 2017).

Sementara itu, dari hasil pra-survey yang penulis lakukan di HSPG BSD, penulis menemukan bahwa masih terdapat beberapa tutor yang masih berstatus mahasiswa ataupun lulusan D3. Banyak pula guru mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Hal tersebut terjadi karena kebutuhan tutor yang mendesak, sehingga proses rekrutmen tutor cenderung dilakukan dengan cepat tanpa memperhatikan kesesuaian calon tutor dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Selain itu, penulis belum menemukan adanya pelatihan yang cukup untuk tutor, terutama bagi tutor yang baru bergabung untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai kurikulum yang digunakan maupun pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran. Pelatihan guru yang berjalan biasanya mengikuti pelatihan dari HSPG Pusat Yogyakarta, sementara HSPG BSD belum mengadakan pelatihan sendiri sesuai dengan masalah yang dihadapi tutor di HSPG BSD.

Kemudian, dari observasi yang penulis lakukan, penulis juga menemukan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki HSPG BSD. Misalnya, di kelas hanya disediakan papan tulis serta spidol. Tidak ada LCD atau proyektor yang disediakan di tiap kelas yang dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk siswa. Adapun LCD dan proyektor yang dimiliki sudah rusak. Sejauh pengamatan penulis, kebanyakan tutor yang mengajar hanya menulis di papan tulis dan menggunakan buku modul yang disediakan oleh sekolah. Adapun materi pembelajaran berupa video misalnya, dikirim kepada siswa melalui Whatsapp untuk dilihat sendiri oleh siswa di rumah masing-masing. Hal lain yang penulis temukan adalah ketiadaan laboratorium IPA atau komputer di sekolah. Adanya laboratorium dapat mempermudah siswa untuk melakukan praktek tertentu sehingga yang dipelajari tidak hanya berkutat pada teori semata, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keterampilan siswa.

Persoalan lain yang dimiliki HSPG BSD adalah keterbatasan SDM. Karena keterbatasan SDM ini, maka pengelolaan sarana dan prasarana yang tersedia tidak berjalan. Selain tutor yang mengajar, HSPG hanya memiliki satu staf akademik, satu staf keuangan dan kepala sekolah. Keterbatasan SDM ini juga mengakibatkan adanya masalah-masalah dalam proses pembelajaran.

Pertama, tutor tidak membuat RPP sebelum pembelajaran dimulai. Di awal semester biasanya tutor akan diminta untuk mengisi siteplan (gabungan antara silabus dan RPP) yang menjadi acuan dalam melaksanakan pembelajaran. Akan tetapi kenyataannya, hanya segelintir tutor yang mengerjakan, dan tidak ada teguran yang diberikan bagi tutor yang tidak mengerjakan siteplan tersebut. **Kedua**, dari observasi yang penulis lakukan, beberapa kali tutor datang terlambat hingga 30 menit dari durasi pembelajaran 60 menit. Tidak ada teguran yang diberikan kepada tutor yang bersangkutan. Teguran biasanya akan diberikan apabila orangtua melakukan komplain. Kedua masalah diatas tentu dapat menurunkan kualitas pembelajaran, dimana masalah tersebut terjadi karena pekerjaan staf akademik sudah *overload* sehingga tidak ada kontrol yang memadai terhadap tutor agar datang tepat waktu ataupun menyiapkan rencana pembelajaran yang baik.

Pembelajaran yang bermasalah tentunya juga akan berdampak pada hasil pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan di HSPG BSD salah satunya adalah dengan uji modul yang dilakukan tiap 2 bulan sekali. Pada beberapa uji modul, beberapa siswa masih mendapat skor yang rendah. Selain itu, beberapa siswa juga belum menunjukkan progres yang baik selama proses belajar, seperti masih malas belajar, tidak mengerjakan tugas yang diberikan tutor, bahkan tidak datang ke sekolah selama berminggu-minggu.

Dari kondisi yang terjadi di HSPG BSD tersebut, maka evaluasi implementasi kurikulum perlu dilakukan. Evaluasi adalah kegiatan sistematis untuk menentukan mutu (nilai dan manfaat) dari suatu program (Zainal, 2019). Adanya evaluasi terhadap implementasi kurikulum di HSPG BSD, maka nantinya akan didapatkan penilaian objektif mengenai apakah implementasi kurikulum di *Homeschooling* HSPG BSD telah berjalan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana evaluasi implementasi kurikulum di *Homeschooling* HSPG BSD.

1.2 Fokus Penelitian

1. Kegiatan *homeschooling* dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu *homeschooling* tunggal, *homeschooling* majemuk dan *homeschooling* komunitas. Penelitian ini akan dilakukan di *Homeschooling* HSPG BSD sehingga jenis *homeschooling* yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah *homeschooling* komunitas, bukan jenis *homeschooling* lainnya. Merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka *homeschooling* komunitas yang dimaksud dalam penelitian ini masuk dalam kategori pendidikan nonformal, bukan pendidikan informal.
2. Yang dimaksud dengan implementasi kurikulum merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Hamalik (2017) yaitu penerapan ide, konsep, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau berbagai aktivitas baru, sehingga dapat terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Lebih lanjut, Hamalik (2017) juga menjelaskan bahwa implementasi kurikulum pada dasarnya terdiri dari tiga tahapan atau tiga kegiatan pokok, yaitu: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Mengacu pada penjelasan tersebut, maka implementasi kurikulum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik pembelajaran yang terdiri atas tiga kegiatan pokok, yaitu: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.
3. Dalam evaluasi kurikulum, terdapat beberapa model-model evaluasi yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah model evaluasi IPO (*Input, Process and Output*). Penelitian ini menggunakan model evaluasi IPO untuk mengevaluasi implementasi kurikulum Paket B di *Homeschooling* HSPG BSD. Terdapat tiga evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi masukan, evaluasi proses dan evaluasi hasil.
4. *Homeschooling* HSPG BSD memiliki beberapa program pendidikan diantaranya: program pendidikan setara Sekolah Dasar atau Paket A, program pendidikan setara Sekolah Menengah Pertama atau Paket B, program pendidikan setara Sekolah Menengah Atas atau Paket C, dan

bimbingan belajar privat. Penelitian ini tidak akan mengkaji implementasi kurikulum dari seluruh program yang ada. Penelitian ini hanya akan berfokus pada implementasi kurikulum pada program pendidikan setara SMP atau Paket B. Pemilihan program Paket B dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan praktis dimana siswa pada program tersebut paling banyak dibandingkan dengan siswa pada program Paket A maupun Paket C. Kondisi serta karakteristik siswa pada program Paket B pun lebih beragam dibandingkan dengan program lainnya.

1.3 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah umum yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini adalah ***“Bagaimana evaluasi implementasi kurikulum Paket B di Homeschooling Putra Gama Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan?”***

Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model IPO yang terdiri atas tiga komponen kerja, yaitu: masukan, proses dan hasil. Berdasarkan model evaluasi tersebut, maka rumusan masalah spesifik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kesesuaian komponen masukan (*input*) dalam implementasi kurikulum Paket B di Homeschooling HSPG BSD berdasarkan standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan?
- b. Bagaimana kesesuaian komponen proses (*process*) dalam implementasi kurikulum Paket B di Homeschooling HSPG BSD berdasarkan standar proses pendidikan kesetaraan?
- c. Bagaimana ketercapaian komponen keluaran (*output*) dalam implementasi kurikulum Paket B di Homeschooling HSPG BSD berdasarkan standar kompetensi lulusan pendidikan kesetaraan?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan umum yang dapat diperoleh setelah penelitian ini selesai dilakukan adalah mengetahui evaluasi implementasi kurikulum Paket B di Homeschooling HSPG BSD.

Sementara, tujuan khusus yang dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian komponen masukan dalam implementasi kurikulum Paket B di Homeschooling HSPG BSD berdasarkan standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian komponen proses dalam implementasi kurikulum Paket B di Homeschooling HSPG BSD berdasarkan standar proses pendidikan kesetaraan.
- c. Mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian komponen *output* dalam implementasi kurikulum Paket B di Homeschooling HSPG BSD berdasarkan standar kompetensi lulusan pendidikan kesetaraan.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini tentu diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah khasanah keilmuan mengenai implementasi kurikulum dalam pendidikan kesetaraan.
2. Menambah khasanah keilmuan mengenai evaluasi pendidikan yang menggunakan model IPO dalam implementasi kurikulum pendidikan kesetaraan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengalaman dalam memahami dinamika lapangan pada implementasi kurikulum, terutama kurikulum homeschooling. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan dan pengalaman bagi penulis terjun langsung

ke lapangan untuk melakukan penelitian evaluasi dengan menggunakan model evaluasi IPO.

2. Bagi guru di Homeschooling HSPG, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan untuk melakukan refleksi mengenai performa dalam melakukan implementasi kurikulum di HSPG selama ini. Yang mana, hasil refleksi diharapkan dapat menjadi bahan untuk melakukan perbaikan ataupun meneruskan apa yang telah berjalan dengan baik.
3. Bagi Homeschooling HSPG BSD, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai implementasi kurikulum Paket B yang telah berjalan saat ini. Dimana informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan kebijakan terkait peningkatan kualitas implementasi kurikulum Paket B.